

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pengangguran tenaga kerja terdidik adalah angkatan kerja dengan minimal tingkat pendidikan menengah ke atas dan tidak memiliki pekerjaan. Menurut Carlson dalam Rahmawati (2014), fenomena yang banyak terjadi setelah seorang mahasiswa lulus dari perguruan tinggi yaitu setelah lulus belum mengetahui apa yang harus dipilih dan dilakukan. Bagi lulusan universitas keadaan tersebut dapat menjadi stressor sehingga akan menimbulkan kecemasan yang berujung menjadi penambahan pengangguran terdidik. Menurut konsep yang digunakan SAKERNAS, pengangguran terdidik adalah penduduk yang berusia 15 hingga 24 tahun dengan tingkat pendidikan tertinggi minimal SMA atau SMK.

Upah yang ditawarkan perusahaan tidak sesuai dengan harapan dari tenaga kerja di Kota Lhokseumawe memicu terjadinya peningkatan jumlah pengangguran jika tidak diikuti dengan lapangan pekerjaan yang memadai (BPS, 2022). Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang memiliki masalah mengenai tenaga kerja. Tingginya jumlah pengangguran terdidik yang menghambat proses pembangunan menjadikan ketenaga kerjaan sebagai suatu persoalan yang sangat luas dan kompleks. Pengangguran muncul akibat dari jumlah tenaga kerja yang tidak seimbang dengan jumlah permintaan lapangan pekerjaan yang tersedia. Pengangguran terdidik yang jumlahnya selalu bertambah tentunya akan menambah beban perekonomian daerah dan mengurangi kesejahteraan rakyat. Kesuksesan sebuah pemerintahan dalam hal pembangunan dapat dinilai dari seberapa jauh

pemerintah mampu menambah lapangan pekerjaan serta mengurangi pengangguran. Adanya lapangan pekerjaan yang baru akan berdampak pada terserapnya tenaga kerja yang ada sehingga terjadi peningkatan pendapatan dan daya beli yang akhirnya juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Astrini, 2013).

Masalah ketenagakerjaan bukan hanya sekedar keterbatasan lapangan atau peluang kerja serta rendahnya produktivitas namun banyak penyebab yang berbeda-beda. Masalah pokoknya tertuju pada kegagalan penciptaan lapangan kerja yang baru dengan meningkatnya laju pertumbuhan *output* industri. Seiring dengan berubahnya lingkungan makro ekonomi mayoritas negara berkembang, angka pengangguran yang meningkat terutama disebabkan oleh terbatasnya permintaan tenaga kerja, dan penyediaan lapangan pekerjaan (Silvia, 2013).

Salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe yaitu pengangguran terdidik merupakan persoalan yang rumit dan lebih serius dari pada masalah perubahan dalam Pendistribusian pemasukan. Kondisi pembangunan ekonomi Kota Lhokseumawe ini tidak sanggup menyediakan kesempatan kerja yang lebih banyak, sehingga masalah pengangguran terdidik dari tahun ke tahun semakin serius. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Lhokseumawe, menyebutkan ditahun 2024, angka pengangguran didominasi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), mencapai 2.784 jiwa. Sementara lulusan perguruan tinggi mencapai 1.440 jiwa, tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mencapai 1.458, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) mencapai 544 jiwa, dan Sekolah Dasar (SD) mencapai 1.036 jiwa. “Memang

ada penurunan tingkat pengangguran terbuka misalnya 2020 mencapai 11,98 persen, 2021 sebanyak 11,16 persen, dan 2022 sebanyak 9,15 persen. Sedangkan untuk kondisi tahun 2023 belum keluar datanya. Apabila hal tersebut tidak segera diatasi dan dicari jalan keluarnya, maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi menambah tingkat kemiskinan. Kompleksitas permasalahan pengangguran terdidik ini memang perlu untuk dibahas dan merupakan isu penting, karena dapat dikaitkan dengan beberapa indikator-indikator seperti indeks pembangunan manusia, kemiskinan, kependudukan, kesehatan, konsumsi dan lingkungan hidup.

Indikator-indikator ekonomi yang mempengaruhi tingkat pengangguran antara lain tingkat inflasi, serta bagaimana investasi. Tingkat inflasi yang tinggi akan berpengaruh pada kenaikan jumlah pengangguran. Serta besarnya *investasi* biasanya akan berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran. Salah satu indikator lainnya yaitu keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat dijadikan tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi yang dicerminkan dari perubahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dalam suatu daerah. PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menandakan semakin baik kegiatan ekonomi daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat berarti produksi dari jenis jasa maupun barang yang dihasilkan juga meningkat, hal ini dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak. sehingga akan berpengaruh terhadap penurunan

pengangguran.

Angka pengangguran terbuka di Kota Lhokseumawe mencapai 10.804 jiwa yang tersebar di empat kecamatan daerah setempat. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Lhokseumawe, Oriza Santifa mengatakan, angka pengangguran saat ini banyak didominasi oleh Sekolah Menengah Atas (SMA) Umum, selanjutnya Sekolah Menengah Atas (SMA) Kejuruan, dan terakhir dari lulusan Universitas. Dikarenakan pengangguran dapat dilihat berdasarkan dari ijazah terakhir yang ditamatkan (pendidikan) oleh yang bersangkutan. Hal ini dapat dilihat pada data pengangguran di Kota Lhokseumawe dibawah ini:

Tabel 1.1
Pengangguran Terdidik di Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2022

Tahun	Pengangguran Terdidik (%)
2008	14.35
2009	13.26
2010	11.83
2011	7.63
2012	10.88
2013	7.46
2014	11.23
2015	13.06
2016	12.15
2017	12,6
2018	12.37
2019	11.06
2020	11.99
2021	11.16
2022	9.15

Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe 2023.

Bedasarkan Tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terdidik pada kota Lhokseumawe cenderung berfluktuasi dimana terendah terjadi

pada tahun 2013 sebesar 7,46 % jiwa dan tertinggi terjadi pada tahun 2008 sebesar 14,35 % jiwa, pengangguran terdidik tertinggi terjadi karena kurang sesuainya perencanaan pembangunan bidang pendidikan dengan perkembangan lapangan kerja. Meskipun demikian pada tahun 2022 kota tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan tersebut bisa disebabkan oleh adanya penambahan tenaga kerja sektor pertanian yang berdampak pada meningkatnya produk domestik regional bruto, dapat dilihat pada tahun 2012 sampai dengan 2013 dimana pengangguran terdidik menurun sangat signifikan hal ini disebabkan turunnya tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi itu terkait penerimaan PNS di Kota Lhokseumawe sehingga pada tahun tersebut pengangguran terdidik turun sangat tajam. Banyaknya lulusan perguruan tinggi menganggur karena adanya ketimpangan antara profil lulusan universitas dengan kualifikasi tenaga kerja siap pakai yang dibutuhkan perusahaan.

Salah satu faktor yang menyebabkan pengangguran terdidik adalah menurunnya daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat yang menurun jelas menurunkan jumlah barang/jasa yang diproduksi oleh perusahaan, dengan keadaan seperti ini maka perusahaan akan mengurangi permintaan tenaga kerja yang berdampak pada berkurangnya kesempatan kerja sehingga pengangguran akan semakin meningkat

Teori inflasi menjelaskan bahwa kenaikan harga terjadi ketika permintaan lebih tinggi dari pada pasokan. Hal ini dapat terjadi karena produsen atau penjual menaikkan harga untuk memperoleh keuntungan lebih besar menurut teori ini, inflasi terjadi karena suatu masyarakat ingin hidup diluar batas kemampuan ekonominya (Atmadja, 2015). Di Kota Lhokseumawe peningkatan biaya kebutuhan hidup dari tahun ke tahun tidak terlepas berkontribusi terhadap perkembangan

tingkat inflasi, yaitu dimana keadaan yang menunjukkan kenaikan tingkat harga umum yang berlangsung secara terus menerus. Oleh karena itu, tingkat inflasi di Kota Lhokseumawe merupakan salah satu ukuran untuk mengukur baikburuknya masalah ekonomi yang dihadapi wilayah tersebut, sehingga pemerintah harus menjalankan kebijakan yang tepat guna menjaga dan mengawasi laju inflasi tentunya, dikarenakan dengan semakin tingginya inflasi yang terjadi dapat berakibat pada pertumbuhan ekonomi yang menurun, sehingga hal ini akan menyebabkan terjadi peningkatan jumlah pengangguran terdidik nantinya. Hal ini dapat dilihat pada data di bawah ini:

Tabel 1.2
Inflasi di Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2022

Tahun	Inflasi (%)
2008	13.78
2009	3.96
2010	7.19
2011	3.55
2012	0.39
2013	8.27
2014	8.53
2015	2.44
2016	5.60
2017	2.87
2018	2.05
2019	1.20
2020	3.55
2021	1.97
2022	5.37

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe 2023.

Bedasarkan Tabel 1.2 di atas dapat dilihat presentase Inflasi di Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi setiap tahunnya dimana terendah terjadi pada tahun 2012 dengan presentase sebesar 0,39 % dan tertinggi terjadi pada tahun 2008

sebesar 13,78%. penyebab utama tingginya inflasi di Kota Lhokseumawe adalah karena adanya kenaikan berbagai harga jenis ikan dan kemudian juga kenaikan harga emas perhiasan namun fenomena yang terjadi pada tahun 2012 dan 2013 dimana inflasi meningkat dari 0,39% menjadi 8,27% hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran secara besar-besaran, seperti kenaikan subsidi pemerintah berdampak pada inflasi, karena ketika subsidi BBM pemerintah rendah, harga BBM naik.

Selanjutnya salah satu indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan penduduk termasuk pengangguran terdidik yaitu tingkat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang merupakan nilai bersih barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode. Dalam realitanya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat, maka jumlah nilai tambah output dalam seluruh unit ekonomi disuatu wilayah akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi di Kota Lhokseumawe tidak sesuai dengan pertumbuhan penduduk, di mana pertumbuhan penduduk lebih besar, hal ini dapat mengakibatkan bertambahnya angka pengangguran, dapat dilihat pada data dibawah ini:

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Atas Dasar
Harga Berlaku di Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2022

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)
2008	270.410.830
2009	267.978.150
2010	371.212.140
2011	346.695.250
2012	566.275.700
2013	673.234.790
2014	932.103.800
2015	763.573.200
2016	772.889.700
2017	807.095.000
2018	846.992.400
2019	889.268.480
2020	891.971.329
2021	942.228.589
2022	960.221.531

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe 2023.

Bedasarkan tabel 1.3 di atas dapat kita lihat pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Lhokseumawe terendah terjadi pada tahun 2009 sebesar 267.978.150 juta Rupiah, ini terjadi dikarenakan terjadinya krisis ekonomi global dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 960.221.531 juta Rupiah karena stabilitas konsumsi masyarakat didukung oleh efektivitas kebijakan penanganan pandemi Covid-19 dan inflasi yang terkendali. Namun penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2014 sampai 2015 hal ini diakibatkan besarnya pengeluaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Lhokseumawe untuk pengeluaran rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, subsidi kepada daerah otonom, subsidi kepada

perusahaan, pembayaran bunga dan cicilan hutang lebih besar dari pada pengeluaran untuk pengeluaran pemerintah. Kota Lhokseumawe memiliki area pertanian yang luas, walaupun dalam kawasan area pertanian yang cukup luas hal ini tidak mampu merekrut tenaga kerja banyak karena minat tenaga kerja muda di sektor pertanian kurang, di antaranya citra sektor pertanian yang kurang bergengsi, berisiko tinggi, kurang memberikan jaminan tingkat, stabilitas, dan kontinuitas pendapatan. Maka ini salah satu yang mengakibatkan pengangguran terdidik mengalami kenaikan di Kota Lhokseumawe.

Disamping Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), investasi juga mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja dengan asumsi apabila nilai investasi meningkat, maka jumlah nilai tambah barang dan jasa akhir dalam seluruh unit ekonomi di suatu wilayah akan meningkat. Barang dan jasa yang jumlahnya meningkat tersebut akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap jumlah tenaga kerja yang diminta. Di Kota Lhokseumawe investasi mempengaruhi pengangguran terdidik dari sisi penawaran tenaga kerja. Dikarenakan dengan semakin besar investasi maka peluang jumlah pekerja yang digunakan dalam menghasilkan barang dan jasa di daerah tersebut akan meningkat, sehingga penyerapan tenaga kerja lebih besar peluang lapangan pekerjaannya. Hal ini dapat dilihat pada data investasi Kota Lhokseumawe dibawah ini:

Tabel 1.4
Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Kota Lhokseumawe Tahun 2008-2022

Tahun	Investasi (Milyar)
2008	23,363.000
2009	26,687.000
2010	23,373.000
2011	23,463.000
2012	152,455.000
2013	116,230.000
2014	99,284.000
2015	520,022.000
2016	1,174,759.000
2017	1.273,359.000
2018	1,448,118.000
2019	1,316,323.000
2020	1,289,223.000
2021	1,648,811.000
2022	1,822,141.000

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Lhokseumawe 2023

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas dapat dilihat investasi Kota Lhokseumawe mengalami fluktuasi setiap tahunnya dimana terendah terjadi pada tahun 2008 sebesar 23,363.000 dan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 1,822,141.000. Salah satunya perusahaan Arun Lhokseumawe ini berfokus pada beberapa sektor yaitu energi, petrokimia, agro industri pendukung ketahanan pangan, logistik serta industri penghasil kertas kraft, dengan banyaknya industri-industri besar di Kota Lhokseumawe maka ini dapat mempengaruhi terhadap terbukanya lapangan pekerjaan di daerah tersebut. Investasi yang meningkat akan berdampak pada meningkatnya kapasitas produksi suatu daerah. Apabila kapasitas produksi meningkat maka permintaan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi juga

akan meningkat pula. Hal ini menyebabkan tersedianya lapangan kerja bertambah yang dapat menurunkan tingkat pengangguran. Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang sedang berkembang di Aceh Utara. Kota Lhokseumawe memutuskan untuk memisahkan diri dari Kabupaten Aceh Utara pada tahun 2001. Sejak saat itu banyak prestasi dan kemajuan yang diraih Kota Lhokseumawe, salah satunya adalah menjadi daerah kota penghasil gas di Provinsi Aceh terbaik.

Menurut Moch. Rum Alim (2017) dalam jurnalnya membahas tentang Analisis Faktor penentu pengangguran terdidik di Indonesia periode 1980-2017. Penelitian ini menggunakan pengangguran terdidik sebagai variabel dependen dan pertumbuhan ekonomi, inflasi dan pengeluaran pemerintah sebagai independen. Putri (2018), membahas tentang analisis pengaruh upah, PDRB, dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja. Fitra Kincaka Riska (2012) tujuan penelitiannya adalah mengetahui Tingkat Pengangguran dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya di Indonesia. Sedangkan Ali, dkk (2020), lebih membahas tentang pengaruh PDRB (ADHK) dan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja.

Penelitian ini tertarik untuk dilakukan karena terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah dimana penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari tiga faktor yang secara teori memiliki pengaruh terhadap pengangguran terdidik. Ketiga faktor tersebut adalah inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Investasi di Kota Lhokseumawe.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besarkah pengaruh inflasi terhadap pengangguran terdidik di Kota Lhokseumawe?
2. Seberapa besarkah pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap pengangguran terdidik di Kota Lhokseumawe?
3. Seberapa besarkah pengaruh investasi terhadap pengangguran terdidik di kota Lhokseumawe?
4. Seberapa besarkah pengaruh inflasi, produk domestik regional bruto (PDRB) dan investasi terhadap pengangguran terdidik di Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditarik tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap pengangguran terdidik di Kota Lhokseumawe.
2. Mengetahui pengaruh produk domestik regional bruto (PDRB) terhadap pengangguran terdidik di Kota Lhokseumawe.
3. Mengetahui pengaruh investasi terhadap pengangguran terdidik di Kota Lhokseumawe.
4. Mengetahui pengaruh inflasi, produk domestik regional bruto (PDRB) dan investasi terhadap pengangguran terdidik di Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diinginkan bisa di dapat dari hasil pengkajian ini terkelompok jadi:

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi Penulis/Peneliti

Manfaat pengkajian untuk penulis yaitu guna memperbanyak wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai pengaruh Inflasi, PDRB dan investas terhadap pengangguran terdidik dikota lhokseumawe.

- b. Bagi Lingkungan Akademik

Menyerahkan wawasan serta pengetahuan bagi pihak akademik, dan selaku bahan pedoman untuk para mahasiswa guna melaksanakan pengkajian yang lebih jauh lagi nantinya.

2. Manfaat Praktis

Pengkajian ini harapannya bisa menyerahkan kerjasama kepada:

- a. Pemerintah

Bagi pengambil kebijakan, pengkajian ini harapannya sanggup menyerahkan keterangan yang bermanfaat dalam mengerti pengaruh Inflasi, PDRB dan investas terhadap pengangguran terdidik dikota lhokseumawe.

- b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai sumber data untuk peningkatan dan kemampuan, serta dapat digunakan sebagai bahan penilaian untuk mengatasi masalah yang ada dalam pengangguran terdidik di kota lhokseumawe.

c. Bagi Swasta

Bagi swasta, sebagai sumber informasi untuk melakukan pengembangan perekonomian yang lebih berguna.